

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Anggara, S. (2013). *Politik Indonesia*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Anugrah, A. (2009). *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Elizabeth, M. Z. (2018). *Resistensi Perempuan Parlemen "Perjuangan Menuju Kesetaraan Gender"*. Depok: Lp3es.
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press.
- Fatahullah. (2009). *Studi Ilmu Politik*. Makassar: Graha Ilmu.
- Firmanzah. (2010). *Persaingan, Legitimasi, Kekuasaan, dan Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- G.A. Ohorella, D. (1992). *Peranan Wanita Indonesia Dalam Masa Pergerakan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Gandhi, & Mahatma. (2002). *Kaum Perempuan Dan Ketidakadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gatara, A. (2008). *Ilmu Politik Memahami Dan Menerapkan*. Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- Handoyo, E. A. (2010). *Etika Politik Dan Pembangunan*. Semarang: Widya Karya.
- Harisson, L. (2007). *Metode Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.
- Haryanto, S. (2017). *Spektrum Teori Sosial*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

- Hornby, A. (1974). *Oxford Learner's Dictionary Of Current English*. Oxford University Press.
- Ibrahim, H. A. (2009). *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Mandar Maju.
- Komaruddin. (1994). *Esiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lizza, H. (2004). *Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru*. Jakarta: Lp3es.
- Lovenduski, & Joni. (2008). *Politik Berparas Perempuan*. Terj. Hardono Ali. Yogyakarta: Kanisius.
- Moleong, L. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Muhadjir. (2005). *Negara dan Perempuan : Rerorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Cv. Adipura.
- Murniati, & Nunuk P. (2004). *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM*. Magelang: Indonesiatara.
- Nugroho, R. (2011). *Gender dan Strategi Pengurus Utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Nurlan. (2008). *Kiat-Kiat Menjadi Anggota DPRD, DPD, DPRD*. Jakarta: Reform Media.
- Poerwadarminta. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prawansa, I. (2006). *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi Pemikiran Tentang Kesenjangan Gender*. Jakarta: Pustaka Lp3s Indonesia.
- Remiswal. (2012). *Mengungkapkan Partisipasi Gender*. Padang: Graha Ilmu.

- Retnoningtias, A. (2005). *Keterlibatan Wanita Indonesia Dalam Pengambilan Keputusan Politik Menurut Pandangan Gender*. Jember: Universitas Jember Press.
- Saidah, Husnul, K & Najmah. (2003). *Revisi Politik Perempuan*. Bogor: Cv. Idea Pustaka Utama.
- Saskia. (1999). *Penghancuran Gerakan Perempuan Di Indonesia*. Jakarta.
- Sastriyani & Siti, H. (2009). *Gender And Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Setiadi, E. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. Bandung: Kencana.
- Seto, I. (2002). *Di Bidang Politik Perempuan Tetap di Bawah Pria*. Jakarta: Erlangga.
- Spradley, J. (1997&2007). *Metode Etnograf*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Suharto, & Edi. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tong, R. 1998. Tong, Rosmarie. 1998. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction. 3rd Edition*. Colorado: Westview Press
- Vitayala, A. (2010). *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa Ke Masa*. Ipb Press.
- Winarno, B. (2007). *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Pt. Buku Kita.

B. Sumber Jurnal

- Humairatuzzahrah, N. (2018). Partisipasi Politik Perempuan. *Jurnal Buletin Hukum & Keadilan*. vol. 2, no. 1d., hlm. 1-8.

Nimrah, S & Sakaria. (2015). Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014). *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, vol. 1 No. 2., hlm. 173-182.

Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender. *Jurnal Politik Islam*, vol. 1, no. 1., hlm. 63-83.

C. Sumber Undang-Undang

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1. Tentang kedudukan laki-laki dan perempuan di mata hukum dan pemerintahan.
2. Undang-Undang No.7 tahun 1984. Tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Kemitraan Negara Urusan Peranan Wanita.
3. Undang-undangan No. 10 tahun 2008. Tentang kuota perempuan di legislatif.
4. Undang-undangan No. 32 tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undangan No.12 tahun 2008. Tentang Pemerintahan Daerah.